

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pendidikan Kejuruan

a. Pengertian Pendidikan Kejuruan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan sendiri memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3).

Menurut Djojonegoro (1998:34) pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja. Kemudian Clark dan Winch (2007: 9) mendefinisikan pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan anak muda dan remaja untuk memasuki lapangan kerja, pendidikan kejuruan merupakan proses yang pembelajarannya berkaitan dengan masalah teknik dan praktik.

Rupert Evans dalam Djojonegoro (1998: 33) mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas tentang pengertian pendidikan kejuruan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mencetak dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi khusus yang dapat bekerja dengan masalah teknik dan praktik sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Tujuan Pendidikan Kejuruan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan siswa untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilannya, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi,

memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan dirinya. Pendidikan kejuruan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, keberadaan pendidikan kejuruan dapat dirasakan manfaatnya bagi siswa, dunia kerja, dan masyarakat.

Menurut Sofyan (2018: 10) pendidikan kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan lulusannya untuk memiliki keahlian yang dapat menunjang pekerjaan yang akan ditekuni lulusan pendidikan kejuruan sesuai dengan bidang tertentu.

Berdasarkan beberapa uraian diatas tentang tujuan pendidikan kejuruan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan memiliki tujuan untuk membekali siswa untuk bekerja pada bidang tertentu serta mengembangkan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan kejuruan harus dibangun dan dikembangkan bersama dan berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) sehingga keterserapan lulusan di DU/DI dapat maksimal dan sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Karakteristik Pendidikan Kejuruan

Menurut Djojonegoro (1998: 37) pendidikan kejuruan memiliki sembilan karakteristik penting yaitu: (1) mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja, (2) didasarkan pada kebutuhan dunia kerja "*Demand-Market-Driven*", (3) penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, (4) kesuksesan siswa pada "*Hand-On*" atau performa dunia kerja, (5) hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan, (6) responsif dan antisipatif terhadap kemajuan

teknologi, (7) *Learning By Doing* dan *Hands On Experince*, (8) membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktek, (9) memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pendidikan umum.

Karakteristik pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk memiliki bekal kompetensi profesional untuk siap memasuki dunia kerja. Oleh karena itulah pembelajaran pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang didasarkan pada bagan yang sangat diperlukan dari adanya perkembangan kompetensi professional. Dengan demikian pembelajaran pada pendidikan kejuruan didesain meliputi pembelajaran teori, praktik, dalam suasana yang menyenangkan, dan kebermaknaan dalam suatu pekerjaan (Sofyan, 2018: 18).

d. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip tertentu, dan prinsip tersebut merupakan ciri khas dari pendidikan kejuruan. Secara komprehensif filosofi pendidikan kejuruan disampaikan oleh Charles Prosser dalam Djojonegoro (1998: 38), yang dikenal dengan, "*The Prosser's Sixteen Theorems on Vocational Philosophy*". Dasar filosofi tersebut selanjutnya dikenal sebagai prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan tempat siswa dilatih merupakan replika lingkungan tempat dimana nanti ia akan bekerja.
- 2) Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas dan latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan ditempat kerja.
- 3) Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang pada kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
- 4) Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.

- 5) Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap potensi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang dapat untung darinya.
- 6) Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.
- 7) Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.
- 8) Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut.
- 9) Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja).
- 10) Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengamalan syarat nilai).
- 11) Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli pada okupasi tersebut.
- 12) Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
- 13) Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pendidikan kejuruan.
- 14) Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode yang digunakan ada hubungan pribadi dengan siswa mempertimbangkan sifat siswa tersebut.
- 15) Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dilaksanakan secara fleksibel, lentur tidak kaku, dan mengalir secara alami.
- 16) Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

Berdasarkan uraian diatas tentang prinsip-prinsip pendidikan kejuruan maka disimpulkan pendidikan kejuruan yang efektif adalah yang berorientasi kepada dunia usaha/dunia industri, artinya pendidikan kejuruan semestinya dimulai dari dunia usaha/dunia industri dan diakhiri di dunia usaha/dunia industri, karena pendidikan kejuruan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha/dunia industri, sehingga pembelajarannya harus mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri.

e. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) tahun 2018, terdapat 9 bidang keahlian 49 program keahlian yang dibagi lagi menjadi 146 kompetensi keahlian. Direktorat Pembinaan SMK selalu melaksanakan evaluasi dan penataan kembali kompetensi keahlian SMK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi kompetensi keahlian di SMK dengan kebutuhan dunia kerja, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk nyata dari perencanaan pendidikan kejuruan dengan pendekatan terhadap kebutuhan industri. Bidang keahlian pada SMK/MAK meliputi:

- 1) Bidang studi keahlian adalah kelompok atau rumpun keahlian pada SMK yang terdiri atas:
 - a) Teknologi dan Rekayasa
 - b) Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - c) Kesehatan
 - d) Agribisnis dan Agroteknologi
 - e) Perikanan dan Kelautan
 - f) Bisnis dan Manajemen
 - g) Pariwisata
 - h) Seni Rupa dan Kriya
 - i) Seni Pertunjukan

- 2) Program studi keahlian adalah jurusan dalam suatu bidang studi keahlian atau pada spektrum sebelumnya disebut bidang keahlian.
- 3) Kompetensi keahlian adalah spesialisasi dalam suatu program studi keahlian atau pada spektrum sebelumnya disebut program keahlian.

Teknologi dan rekayasa merupakan salah satu rumpun/kelompok keahlian pada SMK, yang mana di dalamnya terdapat beberapa program studi keahlian salah satunya adalah Teknik Otomotif. Teknik Otomotif memuat beberapa Kompetensi Keahlian, antara lain:

- 1) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
- 2) Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
- 3) Teknik Alat Berat
- 4) Teknik Bodi Otomotif
- 5) Teknik Ototronik
- 6) Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif
- 7) Otomotif Daya dan Konversi Energi

Tujuan umum dari Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif terdapat pada isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 mengenai tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan bersifat melayani permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak ditentukan oleh dunia usaha/industri atau asosiasi profesi.

Kompetensi yang diajarkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian.

Tujuan khusus kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif adalah membekali siswa dengan keterampilan pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam bidang otomotif. Dalam kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif ini terdapat substansi materi yang meliputi pembelajaran secara umum dan dunia otomotif seperti chasis, kelistrikan, mesin, perbaikan dan perawatan.

2. Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan

a. Pengertian Kemitraan

Secara etimologis, kemitraan merupakan kata turunan dari kata dasar mitra. Mitra, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal (2010: 2) dalam modul membangun jejaring kerja (kemitraan) menjelaskan bahwa kemitraan dimaknai sebagai suatu ikatan kerjasama antara dua pihak atau lebih pada suatu bidang usaha tertentu yang memiliki tujuan bersama untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (2015: 8) dalam buku berjudul kemitraan sekolah dengan pihak eksternal menjelaskan bahwa hakikat kemitraan adalah adanya keinginan untuk berbagi tanggung jawab yang diwujudkan melalui hubungan dimana pihak-pihak yang terlibat saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

b. Tujuan Kemitraan

Menurut Mulyasa (2012: 148) menjelaskan bahwa tujuan membangun hubungan dan kemitraan sekolah dengan masyarakat memiliki dua dimensi yang dapat dilihat: 1) dimensi kepentingan sekolah yang meliputi memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, memperlancar kegiatan pembelajaran, serta bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka mengembangkan program-program sekolah, 2) dimensi kebutuhan masyarakat (pengelolaan hubungan dengan masyarakat) bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat, dan memperoleh anggota masyarakat yang terampil serta meningkatkan kemampuannya.

Tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah dalam membangun kemitraan sekolah adalah: (1) meningkatkan partisipasi masyarakat yakni menumbuhkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah, (2) peningkatan mutu dan relevansi sekolah dengan merancang program yang inovatif, dan meningkatkan mutu layanan sesuai dengan kebutuhan pasar, (3) mensinergikan program sekolah, (4) meningkatkan daya serap lulusan sekolah ke dunia kerja, (5) untuk sosialisasi, promosi, dan publikasi sekolah, (6) peningkatan akses lembaga, bahwa dengan membangun kerjasama akan memperluas akses informasi, teknologi, modal pasar, dan praktik kerja industri/magang, (7) untuk pencitraan publik, (8) penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, 2010: 7-8).

Kemitraan merupakan langkah yang efektif bagi pembelajaran dan pendidikan kejuruan. Kemitraan merupakan langkah paling efektif yang mendukung pembelajaran kejuruan. Saat sekolah selaku penyelenggara pendidikan membuka kesempatan bagi siswa untuk mempunyai relasi dengan berbagai perusahaan, *training center*, dan sistem pendidikan kejuruan, perusahaan akan terdorong untuk memahami pentingnya kemitraan lalu terdorong untuk mengambil bagian di dalamnya (Nurhadi & Lyau, 2018: 300).

c. Manfaat Kemitraan

Manfaat kemitraan yang dapat diperoleh dari program kemitraan sekolah dengan pihak mitra menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (2015: 8-9) yaitu:

1) Mendapat informasi terkini

Sekolah akan mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Selain itu sekolah juga akan mendapat informasi tentang kebutuhan jenis-jenis dan jumlah tenaga terampil yang diperlukan saat ini dan prediksi masa mendatang.

2) Memperoleh bantuan peralatan, tenaga ahli, tenaga sukarela

Mengetahui kebutuhan sekolah akan peralatan, bahan pelajaran, dan tenaga ahli. Sehingga kemitraan yang terjalan antara kedua belah pihak dapat memberikan partisipasi dalam proses pelaksanaan pembelajaran.

3) Mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman

Pihak sekolah dengan pihak mitra dapat berbagi pengalaman tentang pengelolaan sekolah, pengembangan kurikulum, pemberdayaan masyarakat,

pelatihan kompetensi, peningkatan sumber daya manusia, dan efisiensi penggunaan peralatan.

4) Melaksanakan proyek bersama

Sekolah dengan pihak mitra dapat melaksanakan proyek bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, misal dalam pelatihan, pengembangan prototipe peraga, atau pengembangan bakat siswa.

5) Mendapatkan beasiswa

Beasiswa dapat diberikan kepada lulusan sekolah yang berprestasi dengan memberikan beasiswa pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kepada lulusan sekolah tersebut yang berprestasi di tempat kerja.

6) Meningkatkan kreativitas

Kemitraan yang dilakukan diharapkan dapat membuka dan mendorong kreativitas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.

d. Konsep Kemitraan Sekolah dan DU/DI

Beberapa bentuk kerjasama kemitraan yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan industri menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 17-29) diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Praktik Kerja Industri (Prakerin)

Praktik kerja industri (prakerin) merupakan syarat mutlak penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi lembaga pendidikan kejuruan dalam melaksanakan prakerin. Lembaga pendidikan kejuruan yang melaksanakan prakerin akan mempunyai nilai tambah yang dapat digunakan sebagai persyaratan akreditasi dan pembangunan reputasi sekolah. Di samping itu,

kesadaran akan kebutuhan untuk memperkenalkan siswa pada dunia industri guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, menjadi dorongan terbesar bagi lembaga pendidikan kejuruan untuk melaksanakan program prakerin.

2) Kelas Industri

Kelas industri adalah sistem pembelajaran di mana materi pembelajaran sebagian besar disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi/kualifikasi tenaga kerja perusahaan mitra atau sektor industri tertentu. Biasanya kelas industri merupakan kerjasama sekolah dengan sebuah perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan satu sektor industri tertentu, misalnya melalui kerjasama dengan asosiasi. Dengan sistem ini industri dapat mempersiapkan tenaga kerjanya lebih awal dengan kompetensi lebih spesifik sehingga lebih siap untuk bekerja.

Kelas industri adalah kegiatan yang bertujuan supaya siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang ada di industri. Sekolah dituntut untuk mendatangkan industri yang mau memberikan pendidikan di sekolah serta tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang diharapkan adalah rekrutmen tenaga kerja secara langsung. Industri harus berperan dalam pembuatan skenario pembelajaran dan turut serta dalam penyusunan kurikulum kelas industri. Hal tersebut ditujukan dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Wibowo, 2016: 49).

3) Sekolah Sebagai *Training Center*

Training Center (TC) adalah kelas pelatihan yang diadakan di lembaga pendidikan kejuruan bekerja sama dengan industri. Kompetensi yang diajarkan di TC sebagian besar adalah materi-materi khusus dari industri yang jauh lebih

spesifik sesuai dengan target kompetensi perusahaan mitra. TC terbuka untuk siswa dan non-siswa (alumni dan masyarakat umum), juga karyawan perusahaan. Pengajar berasal dari sekolah dan industri. TC juga sering disebut IHT (*In-house Training*). TC atau IHT merupakan kegiatan di luar kurikulum (ekstra kurikulum atau ko-kurikulum).

4) Program Guru Magang dan Guru Tamu

Di tengah laju pertumbuhan teknologi, lembaga pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya yang berkualitas. Selain harus menghadapi perkembangan teknologi, LPTK sebagai salah satu lembaga pencetak guru juga dihadapkan pada kurang sesuainya keterampilan produktif calon guru dengan kurikulum di SMK dan laju teknologi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sinkronisasi dengan SMK maupun dunia industri (Gunadi, 2013: 302).

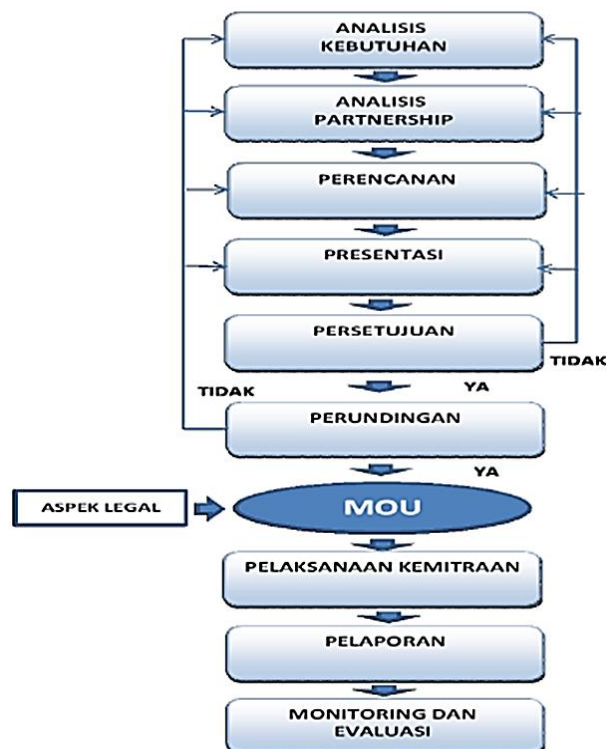
Tanpa kompetensi yang memadai, pengajar akan kesulitan menyampaikan materi pembelajaran serta tidak dapat mengembangkan metode mengajar secara kreatif. Oleh karena itu, yang pertama kali harus selalu diperbaharui kompetensinya adalah para pengajar (guru dan dosen). Sama seperti siswa, para pengajar juga perlu melihat kondisi nyata dunia kerja serta mempelajarinya secara langsung. Magang berlangsung selama minimum 3 bulan. Akan lebih baik lagi bila dapat dilakukan dalam 6 bulan. Selain dengan mengirim pengajar ke industri, pengajar juga dapat belajar dengan mendatangkan praktisi ke sekolah untuk mengisi KBM (guru tamu), di mana saat itu pengajar juga belajar dari guru tamu tersebut.

5) Bursa Kerja Khusus

Bursa Kerja Khusus merupakan unit kerja sekolah yang mempunyai tugas mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Kegiatannya adalah memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja.

e. Prosedur Kemitraan

Prosedur kemitraan dirancang untuk mengorganisasikan proses implementasi program kemitraan sekolah. Prosedur kemitraan dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama dengan dilandasi niat baik dan moral komitmen bersama yang kuat. Berikut alur prosedur kemitraan antar lembaga adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Prosedur Kemitraan antar Lembaga
Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (2015)

Prosedur pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan oleh pendidikan menengah kejuruan menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (2015: 25-32) dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut:

1) Tahap 1

a) Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan secara mendalam untuk memetakan dan mengidentifikasi berbagai potensi yang ada. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek peningkatan akses, pemetaan kemampuan internal dan eksternal, serta peningkatan kualitas pendidikan.

b) Analisis *Partnership*

Analisis *partnership* dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang akan diajak untuk bermitra. Analisis *Partnership* dilakukan agar dapat dihasilkan strategi dan kerjasama yang benar-benar mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas, terutama bagi lulusan SMK.

c) Perencanaan

Perencanaan kemitraan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan kemitraan yang berkesinambungan. Perencanaan kemitraan didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama yaitu: sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan kesejajaran dan kesetaraan.

d) Presentasi

Proses perencanaan kemitraan yang telah dibuat kemudian dipresentasikan kepada pimpinan dan pihak-pihak yang terkait. Dalam presentasi juga dilakukan diskusi dan evaluasi terhadap rencana yang telah dibuat.

2) Tahap 2

a) Persetujuan

Persetujuan pimpinan dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk pendukung dan kelancaran pelaksanaan atas rencana yang telah dibuat.

b) Perundingan

Perundingan dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan bermitra untuk merundingkan segala aspek, ruang lingkup, bentuk kerjasama, dan masalah-masalah teknis untuk dituangkan dalam naskah perjanjian.

c) Naskah perjanjian kerjasama (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan payung dari kerjasama yang atas program kemitran yang akan dilakukan. MoU harus benar-benar memperhatikan aspek legal.

3) Tahap 3

a) Pelaksanaan kemitraan

Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam MoU yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

b) Pelaporan kemitraan

Pelaporan merupakan unsur penting untuk memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan program kemitraan. Pelaporan juga dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan program kemitraan selanjutnya.

c) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka untuk penilaian kinerja dan efektifitas program kemitraan. Monitoring dan evaluasi menuntut komitmen dari berbagai pihak agar dapat dijadikan berkesinambungan.

f. Keberhasilan Kerjasama

Untuk dapat mengetahui keberhasilan kerjasama kemitraan yang dijalankan diperlukan indikator untuk mengukur keberhasilan kerjasama kemitraan. Indikator merupakan petunjuk atau standar yang digunakan untuk mengukur suatu kegiatan atau kejadian yang berlandaskan prinsip-prinsip indikator yaitu: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri ditunjukkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2009: 64):

- 1) Terbentuknya tim kerja kehumasan yang mampu menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
- 2) Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan mitra yang terkait untuk memperoleh masukan sebelum peklaksanaan program.
- 3) Terealisasinya kontrak kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan pihak yang dijadikan mitra.

- 4) Terealisasinya berbagai kegiatan dalam kerangka mensukseskan pelaksanaan program seperti pertukaran pelajar, guru, kepala sekolah, serta pemagangan dalam upaya penambahan wawasan serta kompetensi.

3. Yayasan Toyota dan Astra (YTA)

Yayasan menurut wikipedia adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan Toyota dan Astra atau disingkat YTA merupakan sebuah badan hukum yang didirikan pada tahun 1974 oleh PT Astra Internasional Tbk dan PT Toyota Astra Motor. YTA memiliki visi dan misi untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program penyediaan bantuan dana dan pembiayaan untuk kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan ilmu sains dan teknologi, bantuan alat peraga pendidikan dan buku-buku, terutama teknologi otomotif.

Fokus program YTA yaitu pada program peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar-pelajar Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta kepada staf pengajar perguruan tinggi negeri yang melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Master atau Doktor. Yayasan Toyota dan Astra

melakukan beberapa program dalam bidang pendidikan. Memberi beasiswa reguler SD, SMP, SMA, dan S1 bagi siswa berbakat dan berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dicantumkan dengan maksud untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2012) tentang Implementasi Manajemen Strategik Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Mutu SMK. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada SMK kelompok teknologi bidang otomotif di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik, dengan metode deskriptif dan studi kasus, serta teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya semua SMK di Kota Yogyakarta telah melakukan kerjasama kemitraan dengan industri pasangan khususnya dalam pelaksanaan program PKL/PSG. Sebagai wujud dari kerjasama kemitraan dengan dunia industri SMK telah memiliki skenario pengembangan kerjasama kemitraan yang dituangkan dalam RIPS, sebagai wujud implementasi manajemen strategik, dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan sekolah. Namun sebagian besar SMK belum mampu memberdayakan semua potensi industri pasangan untuk pengembangan sekolah, khususnya dalam pengembangan sumber belajar yang dibutuhkan

dalam pengembangan PBM dan unit produksi dan jasa sebagai implementasi *production base education* dan *work base education* belum dapat diimplementasikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutikno & Fitri (2016) tentang Studi Kemitraan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di SMK PGRI 3 Malang. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SMK PGRI 3 Malang memiliki struktur organisasi yang khusus menangani masalah kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri, (2) Manajemen pengelolaan kerjasama di SMK PGRI 3 Malang antara lain: adanya MoU antara sekolah dan industri mitra, menjaga kualitas siswa, selalu melibatkan industri dalam berbagai kegiatan, (3) bentuk kerjasama yang dilakukan dalam hal penyusunan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran kelas XII, dan (4) bentuk kerjasama dalam bidang sarana dan prasarana terwujud dalam pemenuhan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti, dkk. (2016) tentang Manajemen Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri di SMK Negeri 1 Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kemitraan dilakukan dengan analisis kebutuhan serta mengevaluasi kegiatan kemitraan sebelumnya. Setelah melakukan analisis terhadap kebutuhan sekolah sejak

awal sebelum fokus pembelajaran ada pendekatan dengan dunia usaha dan dunia industri melalui komunikasi yang intensif. Implementasi kemitraan dimulai dengan memetakan dunia usaha dan dunia industri. Jika industri setuju untuk menjalin kerjasama dengan sekolah maka dilakukan dengan membuat nota kesepahaman (MoU), dan menandatangani MoU. Kemudian sekolah melaksanakan kegiatan kemitraan dengan kurangnya kerja sama yang nyata melalui industri seperti pelatihan kerja, pendidikan sistem ganda, dan rekrutmen. Pengendalian kemitraan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kemitraan dan melacak lulusan.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemetaan potensi kerjasama dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
2. Bagaimana pemetaan daya dukung lingkungan dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
3. Bagaimana pemetaan peraturan/undang-undang dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
4. Bagaimana perundingan kedua belah pihak dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?

5. Bagaimana latar belakang dan urgensi kemitraan dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
6. Bagaimana pemetaan tujuan dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
7. Bagaimana tahapan kemitraan dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
8. Bagaimana perjanjian kerjasama dalam perencanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
9. Bagaimana pengorganisasian personalia dalam pelaksanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
10. Bagaimana bentuk kegiatan dalam pelaksanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
11. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?

12. Bagaimana keterlibatan dan dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaan kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
13. Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
14. Bagaimana pelaporan kegiatan dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
15. Bagaimana faktor pendukung dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
16. Bagaimana faktor penghambat dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
17. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
18. Bagaimana ketercapaian tujuam kegiatan kemitraan dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?

19. Bagaimana manfaat kemitraan dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?
20. Bagaimana pengembangan program kemitraan dalam evaluasi kemitraan antara SMK Negeri 1 Purworejo Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan Yayasan Toyota dan Astra?